

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bagaian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Terkait dengan sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, kecermatan, ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah aplikasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibuat dengan berbasiskan Regulasi Pusat yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 yang dijalankan bagi seluruh daerah di Indonesia berdasarkan SE. Mendagri Nomor 900/984/BAKD tanggal 21 September 2006, Selanjutnya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknisi Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD regional SIKD.

Sedemikian pentingnya Informasi Keuangan Daerah, penyajian informasi tersebut tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan data-data yang relevan dan dapat diandalkan. Kualitas pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan sangat tergantung pada data yang masuk dari daerah untuk diproses ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh para pemangku kepentingan. Informasi yang bersangkutan diperlukan Pemerintah Pusat mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Menteri Dalam Negeri.

Infomasi Keuangan Daerah yang tersedia harus memenuhi prinsip- prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujudnya transparansi informasi sehingga dapat diketahui oleh semua pihak.

Guna mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan sistem informasi berbasis komputer didukung dengan pelatihan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat.

Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu SIPKD yang merupakan seperangkat Sistem Aplikasi yang berintegritas, yang digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan asas Efisiensi, Ekonomis, Transparan, Efektifitas, Dan Akuntabilitas. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/984/BAKD Tanggal 21 September 2006, Provinsi NTT ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Incubator atas Pelaksanaan SIPKD, dan penerapan sistem ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diterapkan sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini tahun 2017 dari peralihan sistem manual ke aplikasi

SIPKD yang sangat membantu dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan aplikasi core system yang terdiri dari modul perencanaan, modul penganggaran, modul pelaksanaan dan penatausahaan serta modul pertanggungjawaban.

Berdasarkan penelitian pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT ditemukan beberapa fenomena terkait pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Dimana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih mengalami kendala seperti Sumber Daya Manusia yang belum siap untuk menyesuaikan dari manual excel ke aplikasi SIPKD, selain itu masih terkendala pada jaringan online serta terkendala pada perangkat hardware dan softwarena. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 pelaksanaan aplikasi pada Pemerintah Provinsi terdapat kendala pada kurangnya pelatihan atau Bimbingan Teknisi oleh Pemerintah Pusat untuk para pengawai atau operator pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi NTT sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul "Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Faktor-faktor penyebab penerapan SIPKD belum berjalan maksimal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penerapan SIPKD tidak berjalan maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi NTT.
2. Dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.